

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Indikator Kinerja Makro

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1	CAPAIAN KINERJA TAHUN N	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,28%	70,70%	
2	Angka Kemiskinan	6,59%	6,80%	
3	Angka Pengangguran	3,72%	3,95%	
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,02%	4,55%	
5	Pendapatan perKapita	41963.30	46091.44	
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,208	0,194	

A. Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2019 sampai tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
(1)	(2)
2019	69,67
2020	69,47
2021	69,68
2022	70,28
2023	70,70

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2024

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, berdasarkan hasil perhitungan, IPM tahun 2019 tercatat sebesar 69,67 dan tahun 2020 meningkat menjadi 69,47

kemudian pada tahun 2021 naik menjadi 69,68 dan pada tahun 2022 juga naik menjadi 70,28. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 70,70, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 70,28, hal ini dikarenakan meningkatnya Pengeluaran perKapita Kab. Lima Puluh Kota pada tahun 2022 sebesar 41963.30 dari 46091.44 Pengeluaran perKapita pada Tahun 2023.

B. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Sebagai informasi tambahan, digunakan hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok non makanan.

**Jumlah Penduduk Miskin dan garis Kemiskinan tahun 2019-2023
Kabupaten Lima Puluh Kota**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Garis Kemiskinan (RP/Kap/bln)	% Kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)
2023	27,02	553.068	6,80
2022	26,00	504.670	6,59
2021	28,51	475.123	7,29
2020	26,43	451.295	6,86
2019	26,64	403.030	6,97

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 26,00 jiwa (dalam 000) atau setara dengan 6,59% dari jumlah penduduk, jika dibandingkan dengan tahun 2023, angka kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami keniakan (6,80% pada tahun 2023).

C. Angka Pengangguran (TPT)

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan baik bagi mereka yang belum bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja, atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang putus asa (merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan), dan mereka

yang sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Angka pengangguran yang dinyatakan dalam persentase jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori di atas terhadap total angkatan kerja dan pengangguran yang menggunakan batasan tersebut di atas disebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ketahun. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka, maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan, seperti kriminalitas. Sebaliknya, semakin rendah angka pengangguran terbuka, maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

TPT Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah
1	2
2023	3,95
2022	3,72
2021	2,25
2020	3,03
2019	2,30

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel di atas TPT Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 adalah 3,95%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang yang tergolong angkatan kerja, terdapat 4 orang yang sedang mencari kerja, mempersiapkan usaha, atau tidak mencari kerja karena putus asa.

D. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Perekonomian Lima Puluh Kota pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Lima Puluh Kota tahun 2023 sebesar 4,55%, sedangkan tahun 2022 sebesar 4,02%.

E. Pendapatan Per Kapita

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain, seperti rumah tangga, dan tenaga kerja. Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, maka disajikan data PDRB perkapita. Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Pada tahun 2022 Pendapatan per kapita / PDRB per kapita ADH berlaku sebesar Rp.41.963.300,- mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 yang sebesar Rp.40.594.760,- sedangkan Pendapatan per kapita pada tahun 2023 sebesar Rp.46.091.440,-

F. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah 0,194, sedangkan Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 adalah sebesar 0,208 yang artinya bahwa ketimpangan distribusi pendapatan relatif rendah. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang gini ratio sebesar 0,208 maka ketimpangan pendapatan mengalami penurunan pada tahun 2023. Semakin kecil *Gini Ratio* maka semakin kecil ketimpangan.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tertuang di dalam dokumen perencanaan secara hierarki, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang kemudian setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), khusus yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032, RPJMD Propinsi Sumatera Barat, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD

merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah yang disusun berdasarkan visi, misi, agenda, prioritas, dan program pembangunan.

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 sebagai berikut :

A. Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	7.487	1 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	49.647	1 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesenjangan	5.093	1 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

B. Urusan Kesehatan.

NO	INDIKATOR SPM	SASARAN (ORANG)	TARGET (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	5.258	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	5.246	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	5.000	100
4	Pelayanan kesehatan balita	24.000	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	13.110	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	86.080	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	38.250	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	21.520	100
9	Pelayanan kesehatan penderita DM	2.165	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan ODGJ berat (psikotik)	837	100
11	pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB)	7.646	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	6.569	100

C. Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
I	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	6.355	2023	Dinas PUPR
	1.	Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari melalui jaringan perpipaan	6.355	1 Tahun	
	2.	Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	-	-	-	
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	854	2023	Dinas PUPR
	1.	Pelayanan SPALD-S dengankualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25jiwa/ha	Jumlah Warga Negara yang memperoleh akses sanitasi yang layak	854	1 Tahun	
	2.	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses amanbagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besardari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	-	854	-	
	3.	Pelayanan Penyediaan prasarandan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	-	-	-	

D. Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
I	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi korban Bencana Kabupaten/kota		Jumlah Rumah Korban Bencana yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni			Dinas LHPP
	1.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana		9	1 tahun	
	2.	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana		11	1 tahun	
	3.	Bantuan Akses Rumah Sewa layak Huni Bagi Korban bencana		N/A	N/A	
II	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintahan Daerah Kota		Jumlah Warga Negara yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni			Dinas LHPP
	1	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan /atau Bangunan		N/A	N/A	
	2	Subsidi Uang Sewa		N/A	N/A	
	3	Penyediaan Rumah Layak Huni		N/A	N/A	

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	SKPD Penanggung Jawab
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah yang harus dilayani	4 Jiwa	Satpol PP
		Standar sarana dan prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan unit operasional, c. perlengkapan operasional	1	
		Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakkan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patrol)	1 dokumen	
		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personal SDM)	5 orang	
		Standar pelayanan yang terkena	249 orang	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	SKPD Penanggung Jawab
		dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)		
		Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	30 orang	
		Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakkan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat	1 orang	
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	36.080 jiwa	BPBD
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan & kesiapsiagaan terhadap bencana	1.353 jiwa	BPBD
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah WargaNegara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	180.403 jiwa	BPBD
5	Pelayanan penyeleamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran		Dinas Pemadam Kebakaran
		Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	96 kasus	
		Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	9 kali	

F. Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %

3. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan Surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor 96/S-HP/XVIII.PDG/05/2021, Tanggal 07 Mei 2021, Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2020. Opini atas Laporan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

4. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

No	Jenis	2023		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi/ Anggaran (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	100.274.505.376,00	102.016.528.328,68	101,74
	a. Pajak Daerah	37.780.472.122,00	33.726.801.369,44	89,27
	b. Retribusi Daerah	6.184.000.000,00	2.653.763.935,50	42,91
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.438.688.147,00	4.409.098.147,00	99,33
	d. Lain-lain PAD yang Sah	51.871.345.107,00	61.226.864.876,74	118,04
2	Pendapatan Transfer	1.166.071.220.389,00	1.157.029.256.763,00	99,22
	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.099.499.208.971,00	1.099.848.116.525,00	100,03
	b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.572.011.418,00	57.181.140.238,00	85,89
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.698.000.000,00	3.080.099.400,00	83,29
	a. Pendapatan Hibah	3.598.000.000,00	3.080.099.400,00	85,61
	b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	-	-
	Total	1.270.043.725.765,00	1.262.125.884.491,68	99,38

5. REALISASI PENERIMAAN MENURUT JENIS PENERIMAAN DAN REALISASI PENGELUARAN MENURUT JENIS PENGELUARAN, DAN REALISASI MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

No	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Penerimaan Pembiayaan	28.847.799.303,-	28.847.799.302,66	100
1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	28.847.799.303,-	28.847.799.302,66	100
2.	Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,-	1.500.000.000,-	100
2.1.	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,-	1.500.000.000,-	100
	Pembiayaan Netto	27.347.799.303,-	27.347.799.302,66	100

	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	21.768.707.385,70	-
--	---	---	--------------------------	---

6. INOVASI DAERAH

NO	INOVASI DAERAH	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA		NAMA PENELITIAN/ INSTANSI/ LEMBAGA PENYELENGGAR A INOVASI	ABSTRAK/DESKRIPSI SINGKAT INOVASI YANG DILAKUKAN	PEMANFAATAN INOVASI		KET.
			2018	2019	2020	2021	APBN/APBD	PENYANDANG DANA/ MANDIRI			SUDAH	BELUM	
1.	PELAKSANAAN SADARI (SATU DATA NAGARI) STUNTING	Kabupaten Lima Puluh Kota			√	√	√	-	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kab. Lima Puluh Kota	SADARI STUNTING adalah Satu Data Nagari/ Desa tentang data anak stunting dan data faktor determinan lainnya yang terkait. Kegiatan SADARI STUNTING ini mempunyai maksud sebagai Pedoman dalam Proses Pengukuran dan Publikasi prevalensi stunting pada tingkat Nagari/ Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Jadi dengan adanya gerakan SADARI STUNTING ini data yang ada menjadi akurat, mutakhir, terpusat dan terintegrasi. Selain itu Gerakan SADARI STUNTING ini akan lebih meningkatkan sinergitas antar stakeholder yang berkepentingan dalam penanganan Stunting. Gerakan SADARI STUNTING ini diharapkan juga dapat memperkuat komitmen Pemerintah Daerah, Pemerintahan Nagari/ Desa dan masyarakat dalam kegiatan penanganan Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun ruang lingkup dari kegiatan SADARI STUNTING ini adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan SADARI STUNTING. 2. Prosedur SADARI STUNTING. 3. Keluaran SADARI STUNTING. 4. Publikasi SADARI	√		

										STUNTING. 5. Koordinasi SADARI STUNTING. 6. Pembiayaan. Kegiatan SADARI STUNTING ini dilaksanakan oleh : Kader Posyandu, Tenaga Pelaksana Gizi, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Bidan Desa, Wali Nagari (Kepala Desa), BAMUS Nagari, Pengurus Rumah Desa Sehat (RDS), Kepala Puskesmas, Guru PAUD dan Kader KB. Secara umum, setiap pelaksana Kegiatan SADARI Stunting ini memiliki tugas sebagai berikut : 1. Kader Posyandu Prosedur SADARI Stunting meliputi tahapan : (a) Pengumpulan data; (b) Pengolahan data; (c) Validasi data; (d) Musyawarah RDS; (e) Finalisasi input data; (f) Publikasi.			
2.	Pengembangan Nagari / Desa MANTAP (Mandiri dan Tahan Pangan)	Kabupaten Lima Puluh Kota			√		√	-	Dinas Pangan dan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kab. Lima Puluh Kota	Upaya Memantapkan ketahanan pangan merupakan prioritas utama pembangunan. Di sisi lain, kerawanan pangan dan gizi sangat terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Trend perkembangan Human Development Index (HDI) dari tahun 1980-2012 meningkat sebesar 49% atau rata-rata 1,5% per tahun dari 0,422 naik menjadi 0,629. Meningkatnya kualitas SDM akan meningkatkan produktivitas dan sekaligus meningkatkan daya saing SDM yang pada akhirnya diharapkan dapat memperbaiki status sosial ekonomi masyarakat. Dengan adanya program Nagari mantap ini akan mengurangi jumlah desa/ nagari yang masih miskin atau tertinggal sehingga menjadi desa/ nagari yang mandiri dan sejahtera masyarakatnya.	√		
3.	GEBETAN	Kabupaten Lima Puluh Kota			√		√		Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Gerakan Pelayanan Bengkel Alsintan (Gebetan) merupakan salah satu inovasi yang diciptakan dalam rangka memudahkan petani melakukan service/ perbaikan terhadap Alsintan (Alat mesin	√		

										pertanian) milik mereka, sehingga dengan menghubungi dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan, maka akan dilakukan perbaikan alsintan tersebut dengan cara mendatangkan petugas ke lokasi Alsintan yang perlu perbaikan. Inovasi ini memudahkan petani sehingga petani tidak perlu membawa Alsintan mereka ke Bengkel untuk perbaikan/ service.			
4.	Video Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Sektor Pariwisata	Kabupaten Lima Puluh Kota			√		-	-	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kab. Lima Puluh Kota	Pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia membuat terjadinya penurunan aktivitas masyarakat di seluruh sektor, termasuk perekonomian, khususnya Sektor Pariwisata. Untuk itu dalam menghadapi "New Normal" yang telah digaungkan oleh Pemerintah, seluruh sektor harus melakukan terobosan dan inovasi dalam menghadapi "New Normal" ini termasuk sektor Tempat Wisata. Inovasi ini harus sesuai dengan protokol pencegahan covid-19, mulai dari memakai masker, mencuci tangan dan peraturan-peraturan lainnya. Selain itu, inovasi yang dilakukan juga harus membuat masyarakat nyaman dan aman dalam melakukan kegiatan di Tempat Wisata.	√		
5.	Video Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Sektor Pasar Tradisional	Kabupaten Lima Puluh Kota			√		-	-	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kab. Lima Puluh Kota	Pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia membuat terjadinya penurunan aktivitas masyarakat di seluruh sektor, termasuk perekonomian, khususnya Sektor Pasar Tradisional. Untuk itu dalam menghadapi "New Normal" yang telah digaungkan oleh Pemerintah, seluruh sektor harus melakukan terobosan dan inovasi dalam menghadapi "New Normal" ini termasuk sektor Pasar Tradisional.	√		

											Inovasi ini harus sesuai dengan protokol pencegahan covid-19, mulai dari memakai masker, mencuci tangan dan peraturan-peraturan lainnya. Selain itu, inovasi yang dilakukan juga harus membuat masyarakat nyaman dan aman dalam melakukan transaksi maupun kegiatan berbelanja di Pasar Tradisional.			
	6.	Video Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Sektor Restoran/ Rumah Makan	Kabupaten Lima Puluh Kota			√		-	-	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kab. Lima Puluh Kota	Wabah Pandemi Covid-19 yang belum ditemukan vaksinnya membuat belum pastinya kapan wabah ini akan berakhir. Oleh sebab itu, kita mungkin memang harus "beradaptasi" kembali dengan situasi "New Normal" ini di seluruh sektor kehidupan masyarakat, termasuk sektor UMKM yaitu Restoran/ Rumah Makan. Restoran/ Rumah Makan sebagai salah satu sektor yang terdampak pandemi covid-19 ini harus berinovasi terhadap situasi di atas, sehingga perekonomian dapat kembali stabil. Inovasi yang dapat dilakukan pada sektor Restoran/ Rumah Makan adalah melakukan pelayanan kepada pelanggan dengan cara memberikan pelayanan prima yang sesuai dengan Protokol Pencegahan Covid-19.	√		
	7.	Video Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Sektor Pasar Modern/ Minimarket “BATA” (Belanja Aman Taat Aturan)	Kabupaten Lima Puluh Kota			√		-	-	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kab. Lima Puluh Kota	Pandemi Covid-19 yang terjadi mengakibatkan banyak sektor yang mengalami kemunduran, termasuk sektor perdagangan. Belum jelas kapan berakhirnya pandemi covid-19 ini "mewajibkan" kita harus membuat terobosan dan inovasi dalam usaha menjalankan roda kehidupan ini termasuk sektor perdagangan. Adapun inovasi yang telah diterapkan adalah memulai "New Normal" dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan covid-19. Pelayanan	√		

											diberikan sesuai Protokol Kesehatan dalam mencegah covid-19 sehingga Belanja Aman dan Taat Aturan (BATA). Inovasi ini membuat masyarakat tetap dapat beraktivitas ditengah pandemi covid-19 dengan membuat aturan-aturan yang mendukung upaya pencegahan pandemi covid-19 ini.			
											Inovasi yang diterapkan adalah dengan mewajibkan pengunjung memakai masker dan mencuci tangan menggunakan sabun sebelum masuk ke dalam minimarket, menjaga jarak dengan orang lain selama berada di dalam minimarket, melakukan pembayaran ke kasir sesuai dengan batas jarak dan antrian yang telah ditetapkan.			
8.	Video Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Sektor PTSP “DINDA” (Dedikasi, Integritas dan Akuntabilitas	Kabupaten Lima Puluh Kota			√		-	-	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kab. Lima Puluh Kota	Wabah Pandemi Covid-19 ini sangat mempengaruhi segala segi kehidupan masyarakat, baik dari bidang kesehatan, sosial dan ekonomi. Pandemi covid-19 ini sudah berlangsung lebih dari 3 bulan sejak kemunculan kasus pertama di awal bulan Maret 2020 dan sampai hari ini belum ada kepastian kapan pandemi covid-19 ini akan berakhir. Oleh Sebab itu, kita perlu untuk menyongsong perubahan untuk melakukan "New Normal" dalam kondisi pandemi Covid-19 ini.	√			
										Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sebagai salah satu OPD yang melakukan pelayanan publik wajib melakukan inovasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan harus memenuhi standar protokol pencegahan covid-19 yang mengutamakan Dedikasi, Integritas Dan AKuntabilats (DINDA). Upaya yang dilakukan adalah dengan mewajibkan				

										masyarakat mencuci tangan sebelum masuk tempat pelayanan, mewajibkan masyarakat memakai masker sebelum masuk dan selama berada di dalam kantor pelayanan, mewajibkan masyarakat menjaga jarak dengan orang lain selama berada di dalam kantor PTSP dan mengatur jarak antara masyarakat dan petugas layanan PTSP sesuai dengan batas yang ditetapkan.			
9.	Likoboss	Kabupaten Lima Puluh Kota		√			√		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Likoboss (Lima Puluh Kota Bantu OSS) adalah inovasi berupa pemberian bantuan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan izin melalui OSS. Hal ini telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Nagari Tanjung Aro Sikabu-kabu	√		
10.	Sistem Informasi Kelembagaan Perikanan (Sibaper)	Dinas Perikanan		√					Nurafni Fiazia, S.Pi	Sistem Informasi Kelembagaan Perikanan (SIBAPER) merupakan sebuah sistem informasi manajerial berbasis web komputer yang dirancang untuk mengelola informasi dari basis data kepada stake holder tentang kelembagaan perikanan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan sistem ini, informasi mengenai kelembagaan perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diakses dengan mudah dan real time sehingga dapat membantu stake holder baik dari kalangan pemerintah maupun dari kalangan masyarakat perikanan dalam menyusun strategi perumusan kebijakan pembangunan perikanan sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Sistem ini juga merupakan media interaksi antar kelompok perikanan yang terdaftar sehingga kelompok dapat menjalin relasi/jaringan bisnis ataupun kerjasama usaha perikanan.		√	sistem ini sedang dibangun dan diperkirakan akan dapat dimanfaatkan (running) pada tahun 2020
11.	Pemanfaatan solar cell	Nagari					√	√	Posyantegnag		√		

		untuk pompa air	Tujuh Koto Talago Kec. Guguak							Tujuh Koto Talago			
12.		Pembuatan arang sekam sebagai substitusi pupuk	Nagari Tujuh Koto Talago Kec. Guguak						√	Posyantegnag Tujuh Koto Talago		√	
13.		Penemuan alat penyang	Nagari Tujuh Koto Talago Kec. Guguak						√	Posyantegnag Tujuh Koto Talago		√	
14.		Pembuatan pupuk organik dari thitonia	Nagari Tujuh Koto Talago Kec. Guguak						√	Posyantegnag Tujuh Koto Talago		√	
15.		Pembuatan mikro organisme lokal (MOL)	Nagari Tujuh Koto Talago Kec. Guguak						√	Posyantegnag Tujuh Koto Talago		√	
16.		Aplikasi konsep jajar legowo	Nagari Tujuh Koto Talago Kec. Guguak						√	Posyantegnag Tujuh Koto Talago		√	
17.		Sasupi (sarok sumber piti)	Nagari Tujuh Koto Talago Kec. Guguak					√	√	Nagari Tujuh Koto Talago dan Puskesmas Padang Kandi		√	
18.		Sijontu (Siap Jopuk Anta Pasien)	Nagari Tujuh Koto Talago Kec. Guguak					√		Puskesmas Padang Kandi		√	
19.		PT SUP (Program makanan tambahan sayur dari Usila ke Posyandu Balita)	Nagari Tujuh Koto Talago Kec. Guguak					√	√	Puskesmas Padang Kandi dan Usila Tujuh Koto Talago		√	
20.		Densus JJ (Deteksi Dini Khusus Penyakit Jemaah Jumat)	Nagari Tujuh Koto Talago Kec. Guguak					√		Puskesmas Padang Kandi		√	
21.		Amblan Tujuh nan	Nagari						√	Nagari Kubang		√	

		Tungga	Kubang Kec. Guguak										
22.	MINYAK IKAN DARI JEROAN IKAN LELE	Lokasi Poklahsar Sembilan Saudara Nagari Koto Tengah Simalanggan g, Kecamatan Payakumbuh		√					Penyuluh Perikanan Kecamatan Payakumbuh bersama Poklahsar Sembilan Saudara	Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar) Sembilan Saudara Bergerak di Bidang Pengolahan Ikan Lele Asap. Dalam Proses pengolahan Ikan Lele Asap menghasilkan Limbah berupa Jeroan Ikan Lele. Selama Ini Jeroan Ikan Lele tidak dapat dimanfaatkan dan menjadi limbah yang dibuang. dengan adanya kerja sama Penyuluh Perikanan Kecamatan Payakumbuh dengan Poklahsar Sembilan Saudara Limbah Jeroan Ikan lele dijadikan Minyak Ikan. Dari referensi yang ada, minyak ikan air tawar juga kaya akan Asam Lemak omega 3 dan 6 Serta EPA dan DHA, kandungan ini menjadi alasan utama dimana masyarakat menyatakan ikan sangat baik untuk kesehatan walaupun tidak sebanyak ikan laut. Dari 100 Kg ikan Segar dapat menghasilkan 5 Liter Minyak Ikan. Minyak ikan yang didapat bisa dikonsumsi karena tidak berbahaya, hanya saja kandungannya masih banyak campurannya, seperti ada sedikit air, protein, zat-zat terlarut lainnya.lebih baik dikonsumsi sebagai bahan tambahan makanan/ pakan ternak, karena bisa meningkatkan nilai nutrisinya, akan tetapi untuk dijadikan minyak goreng perlu dilakukan pemurnian karena minyak ikan kaya dengan asam lemak tidak jenuh yang mudah teroksidasi, jika dipanaskan dalam suhu tinggi, justru membuat rusak asam lemak tidak jenuhnya. Saat ini Minyak Ikan ini sedang diuji proximat.		V	
23.	Baristand Pewarna Dari Gambir)	Kabupaten Lima Puluh Kota		√			√		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Pemanfaatan gambir sebagai ewarna alam pada batik dan tenun merupakan prospek bagus	√		
24.	SABUN CUCI	Kabupaten		√			√		Dinas	Cairan pembersih mengandung jeruk dan		√	

		PIRING/PEMBERSIH DARI BUAH JERUK MUDA SELEKSI PENJARANGAN BUAH	Lima Puluh Kota							Perindustrian dan Tenaga Kerja	cuka yang cukup ampuh dalam membersihkan kotoran dan mampu menghilangkan beragam kotoran dan bau. Di Kabupaten Lima Puluh Kota penghasil jeruk di sangat berpotensi sebagai sumber bahan baku sabun pembersih ini. jeruk yang digunakan adalah buah yang terbuang dari penjarangan buah jeruk(saat masih kecilagar buahnya besar-besar dan sempurna).			
25.		PENGAWET MAKANAN DARI GAMBIR	Kabupaten Lima Puluh Kota		√			√		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Semakin meningkatnya penggunaan bahan pengawet sintetis makanan yang bisa menimbulkan masalah kesehatan yang sangat mendorong pihak untuk mencari bahan pengawet alternatif . Salah satunya bahan alami yang di harapkan sebagai pengawet alternatif potensial adalah daun gambir. Pemanfaatan itu juga mampu meningkatkan nilai tambah tanaman gambir itu sendiri dan kesejahteraan petani gambir	√		
26.		RUMAH PENDINGER KERUPUK UBI	LIPI		√			√		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	di Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota usaha penganeekaragaman produk olahan ubi kayu banyak dilakukan oleh industri skala rumah tangga (IRT). Namun, dalam proses pengolahannya masih menggunakan teknologi sederhana sehingga produktivitas dan pendapatan usaha terbatas. Industri rumah tangga masih menggunakan metode pengeringan konvensional berupa pengeringan melalui panas matahari. Hal ini akan menyebabkan ketergantungan produksi kerupuk ubi terhadap perubahan cuaca. Dari hasil kegiatan ini teknologi yang diintroduksi mampu meningkatkan produktivitas produksi kerupuk ubi hingga 2 kali lipat dari proses produksi dengan menggunakan teknologi konvensional sebelumnya.		√	

27.	MINUMAN PROBIOTIK DARI BUAH JERUK	POLITANI PAYAKUMBUH		√			√		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Minuman probiotik adalah minuman yang mengandung sejumlah bakteri probiotik yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Minuman probiotik biasanya memiliki rasa yang enak, segar, dan aman dikonsumsi siapapun. Minuman probiotik bisa diolah dengan mencampurnya bersama buah jeruk. Pemanfaatan itu juga mampu meningkatkan nilai tambah buah jeruk itu sendiri dan kesejahteraan petani jeruk.	√	
28.	TEH DAN PERMEN JELI DARI GAMBIR	BPTP	√	√			√		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Teh dan permen sudah dikonsumsi oleh kebanyakan masyarakat namun penggunaan daun gambir sebagai bahan baku produk ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Pemanfaatan itu juga mampu meningkatkan nilai tambah buah gambir itu sendiri dan kesejahteraan petani gambir	√	
29.	GULA CAIR DARI AREN	FAK TEKNIK INDUSTRI UNAND		√			√		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Kelebihan gula cair adalah gampang penggunaannya, Bisa ditakar sesuai keperluan, Bisa dimasukkan botol, jerigen, drum, dll, sebenarnya yang paling efektif, mudah membuatnya, praktis dalam penggunaannya, dan lebih menguntungkan. Gula cair dari aren dapat meningkatkan nilai tambah air nira daripada diproses menjadi tuak yang banyak diproduksi di Lima Puluh Kota.	√	
30.	KERAJINAN TAS KOMBINASI ANYAMAN MANSIANG DENGAN TENUN KUBANG/SONGKET HALABAN, BORDIR DAN KULIT	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		√			√		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Produk kumbuik yang diproduksi oleh masyarakat taratak turun temurun secara ekonomi kurang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan mengkombinasikan anyaman ini dengan produk tenun dan kulit akan meningkatkan nilai tambah dan diminati oleh konsumen khususnya wisatawan sebagai oleh-oleh.	√	
31.	TENUN KUBANG / SONGKET HALABAN KOMBINASI DENGAN JAHIT SUJI	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		√			√		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Kombinasi tenun kubang / songket halaban dengan jahit suji simalanggang akan tercipta produk yang sangat bagus dan dapat tercipta hubungan yang saling	√	

		SIMALANGGANG											
32.	Solmed	Kabupaten Lima Puluh Kota	√				√		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota	menguntungkan sesama pengrajin. Solmed (Satu Orang Operator Melayani Semua Dokumen Kependudukan) merupakan bentuk pelayanan dalam penerbitan dokumen kependudukan di kantor dimana satu operator dapat menerbitkan beberapa dokumen kependudukan kependudukan seperti KK, KTP, Surat Pindah/Datang dan akta catatan sipil	√		
33.	Semedi	Kabupaten Lima Puluh Kota	√				√		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota	Semedi (Satu Jam Mesti Jadi) merupakan bentuk pelayanan prima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melayani masyarakat dalam segi waktu operator memproses dokumen kependudukan paling lama satu jam selesai kalau persyaratan lengkap	√		
34.	Pelumas	Kabupaten Lima Puluh Kota	√				√		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota	Pelumas (Pelayanan Untuk Masyarakat Disabilitas) adalah bentuk pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengurus dokumen kependudukan bagi masyarakat penyandang disabilitas, baik di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dengan fasilitas antara lain kursi roda, maupun petugas yang langsung mendatangi ke rumah yang bersangkutan	√		
35.	Kadang Dia Tamu	Kabupaten Lima Puluh Kota							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota	Kadang Dia Tamu (KTP-Elektronik Datang dihari Ulang Tahunmu) merupakan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menerbitkan dan mengirimkan KTP Elektronik disaat bagi remaja yang berulangtahun ke -17 sebagai hadiah ulang tahun		√	
36.	Asi Peduli	Kabupaten Lima Puluh Kota					√		Dinas Kependudukan	Asi Peduli (Aplikasi Kependudukan On Line) merupakan bentuk pelayanan Dinas		√	

			Kota							dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk aplikasi cerdas secara elektronik, dimana masyarakat mengurus dokumen kependudukan melalui aplikasi peduli secara on line yang terkoneksi dengan sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), bagi masyarakat yang akan mengurus dokumen dengan mengakses langsung melalui HP android melalui playstore/google play dengan memasukkan nomor Kartu Keluarga saja maka akan muncul menu utama, maka masyarakat akan memilih permasalahan yang akan dikehendaki (dokumen yang akan diurus) misalnya “ndak punyo akta lahia” maka akan keluar persyaratan yang akan dilengkapi dalam penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP, Surat Pindah/Datang atau Akta Capil tersebut selanjutnya dengan mengklik “daftar” akan menunjukkan formulir isian layanan digital opperless) yang dibutuhkan tersebut maka akan menceklis persyaratan yang ada selanjutnya, apabila persyaratan dinyatakan lengkap maka sistem akan memproses dokumen yang diurus selanjutnya akan terbitlah dokumen yang bersangkutan			
37.	Salak Soa	Kabupaten Lima Puluh Kota					√			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota	Salak Soa merupakan bentuk pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota bagi masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukannya dengan sistem mendaftar melalui HP dimana masyarakat yang berurusan akan menelepon operator yang ditunjuk, maka operator akan melayani pukul berapa masyarakat tersebut bisa datang di kantor Dinas Kependudukan dan		√	

										Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota			
38.	PADAN	Kecamatan Kapur IX	√	√			√		Kantor Camat Kapur IX	Motivasi pengembangan PADAN (Pelayanaugan Administrasi Terpadu Nagari) melalui pelayanan langsung administrasi kependudukan di tingkat nagari berupa pelayanan pembuatan Kartu Keluarga, Surat Pindah/Datang, Akta Kelahiran, dan surat-surat lainnya ke semua jorong yang ada di Kecamatan KApur IX. Dengan adanya pelayanan PADAN ini masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor Camat untuk berurusan, cukup sampai kepada petugas PADAN sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Sedangkan untuk berurusan ke Disdukcapil cukup petugas PATEN Kecamatan yang mewakili	√		
39.	Pengeluaran AK-1 Lewat BKK SMK	Kabupaten Lima Puluh Kota	√	√			√		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Pelayanan AK-1 melalui BKK SMK (Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan) untuk mewujudkan pelayanan prima bagi pencari kerja. Pencari kerja tidak perlu jauh-jauh datang ke dinas untuk mengurus AK-1	√		
40.	Kerjasama rekrut penempatan kerja AKAD ke Batam dan daerah lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	√	√			√		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Calon pencari kerja bisa seleksi dan direkrutdi Kabupaten Lima Puluh Kota. Calon tegana kerja tidak perlu jauh-jauh lagi seleksi ke provinsi dan menghemat biaya	√		
41.	Penyebarluasan bursa kerja lewat media radio dan media sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	√	√			√		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Penyebarluasan bursa kerja lewat media radio dan media sosial dapat memberikan informasi lowongan pekerja ke seantero Kabupaten lima Puluh Kota.			